Journal of Education and Teaching Learning (JETL)
Volume 8, Issue 3, September 2026
Journal Homepage:
http://pusdikra-publishing.com/index.php/jetl

Diksi dan Eufemisme dalam Komunikasi Pejabat Publik: Implikasi bagi Pembelajaran Bahasa Indonesia

Risa Miladiyati[1], Dini Nuranjani[2], Yusi Yustisian Adlah[3], Dhiva Auria Gustandi[4], Sisi Ila Hayati[5]
[1,2,3,4,5] *Universitas Cipasung Tasikmalaya, Indonesia*
Corresponding Author : risamiladiyati@uncip.ac.id

ARTICLE INFO
Article history:
Received
20 August 2026
Revised
17 September 2026
Accepted
05 October 2026

ABSTRACT

Bahasa pejabat publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan kebijakan, tetapi juga menjadi sumber daya strategis untuk membangun makna, mengelola persepsi publik, dan merespons tekanan sosial. Dalam konteks tersebut, pilihan diksi dan eufemisme menjadi penting, terutama ketika pejabat menyampaikan isu sensitif seperti kontroversi kebijakan, kritik, kesalahan, dan keresahan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis wacana berbasis korpus terhadap 40 pernyataan pejabat publik yang dikumpulkan dari konferensi pers, pidato resmi, dan media sosial resmi sepanjang 2026, yang didokumentasikan, diverifikasi, dikode, dikategorikan, dan diinterpretasikan berdasarkan pilihan leksikal, konteks, referen, dan fungsi komunikatif. Hasil menunjukkan lima gaya komunikasi, yaitu asertif, akomodatif, retoris-populis, evasif, dan defensif, dengan eufemisme paling menonjol pada gaya defensif dan evasif melalui diksi yang memperhalus makna negatif, menunda kepastian, mengalihkan perhatian, dan mempertahankan citra positif, serta kecenderungan berbeda antara saluran komunikasi. Simpulannya, pilihan diksi pejabat publik bersifat strategis dan dipengaruhi oleh saluran komunikasinya, sehingga eufemisme perlu dipahami sebagai fenomena linguistik sekaligus sosial. Secara pedagogis, temuan ini berimplikasi pada pemanfaatan komunikasi pejabat publik sebagai bahan ajar autentik untuk melatih peserta didik membedakan makna denotatif dan kontekstual, mengidentifikasi eufemisme, dan mengembangkan literasi kritis dalam membaca wacana publik.

Key Word *Diksi, Eufemisme, Pejabat Publik, Komunikasi Publik, Literasi Kritis.*
How to cite https://pusdikra-publishing.com/index.php/jetl

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Bahasa adalah instrumen utama pejabat publik untuk menyampaikan informasi, menjelaskan kebijakan, dan membangun hubungan dengan masyarakat. Pernyataan pejabat kini hadir tidak hanya lewat konferensi pers dan pemberitaan, tetapi juga lewat media sosial resmi kelembagaan. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik,

lembaga pemerintah aktif memakai media sosial sebagai instrumen komunikasi strategis untuk membangun relasi dan persepsi publik (Anggara et al., 2024; Hasti & Qodir, 2024; Tuhana et al., 2023; Widiasih et al., 2024), sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga (Haryadi, 2024; Saud & Margono, 2021).

Karena itu, pilihan kata pejabat publik penting dikaji: kata tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan cara masyarakat memahami peristiwa. Bahasa publik memuat strategi evaluasi, pembingkaian, dan pengelolaan citra, sehingga pilihan linguistik perlu dipahami menurut konteks dan fungsi komunikatifnya (Sun & Liu, 2023). Dalam wacana politik Indonesia, pilihan kata pada pidato dan debat pejabat turut membentuk citra, legitimasi, dan strategi kekuasaan (Kurniawati et al., 2022; Nurhadi & Utami, 2026), sehingga komunikasi pejabat publik menjadi sumber autentik yang relevan untuk dikaji.

Secara konseptual, diksi adalah pemilihan kata untuk merepresentasikan gagasan, tindakan, keadaan, atau sikap sesuai konteks; kata yang sama dapat menimbulkan efek ketegasan, kesantunan, kepastian, atau keberpihakan yang berbeda menurut situasi, audiens, dan tujuan pesan (Rozak Riaji et al., 2026). Pada isu sensitif, pilihan kata kerap berwujud eufemisme, yakni ungkapan yang lebih halus, tidak langsung, atau berdampak negatif lebih ringan daripada ungkapan yang lugas dan konfrontatif. Gejala ini dijumpai dalam pidato kenegaraan, media daring, hingga unggahan resmi pejabat di media sosial (Azaky et al., 2024; Harista et al., 2025).

Sebagai manifestasi diksi, eufemisme banyak dikaji. Crespo-Fernández (2018) menunjukkan bahwa eufemisme lazim menjadi strategi diskursif untuk membicarakan hal sensitif, meredam kesan negatif, menghindari resistensi audiens, melindungi diri (*self-protection*), dan membangun citra positif aktor politik. Aytan et al. (2021) memperlihatkan bahwa eufemisme adalah strategi retoris untuk menyamarkan atau melunakkan representasi realitas, sehingga bentuk yang tampak netral menyimpan fungsi komunikatif yang kompleks. Jaganegara dan Wijana (2023) mengidentifikasi eufemisme dalam berita politik Indonesia sebagai alat penyamaran (*disguise tool*) berbentuk metafora, litotes, generalisasi, dan sirkumlokusi.

Kajian lintas negara menguatkan bahwa pilihan bahasa dalam wacana politik adalah strategi retoris yang sarat kepentingan. Wang dan Inbar (2021) menemukan bahwa penggunaan bahasa moral oleh elite politik Amerika Serikat bergeser mengikuti kekuasaan politik, Khajavi dan Rasti (2020) menunjukkan penggunaan strategi retoris dan persuasif dalam pidato kampanye, dan Liu dan Lei (2018) membuktikan bahwa strategi wacana memengaruhi pemaknaan

peristiwa politik. Pola eufemisme berbeda antarbahasa (Al-Khasawneh, 2018; Al-Momani, 2017), dan dalam pidato pemimpin negara eufemisme menjaga muka (*face-saving*) serta menyamarkan tanggung jawab (Filimonova & Sukhanova, 2025; Jabborova, 2025).

Dalam konteks Indonesia, eufemisme oleh pejabat publik banyak dijumpai di media daring. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa eufemisme dipakai untuk menyampaikan isu sensitif secara halus, menghindari konflik, dan mempertahankan citra komunikator (Refma et al., 2026; Rosyidah et al., 2025; Siahaan et al., 2024). Refma et al. (2026) menambahkan bahwa eufemisme bukan sekadar perangkat kesantunan, melainkan berkaitan dengan aktivitas, kondisi, status sosial, dan posisi kekuasaan subjek yang dibicarakan, serta dipakai untuk meredam makna negatif dan menjaga citra aktor maupun institusinya. Pemilihan eufemisme oleh pejabat publik dengan demikian bukan gejala netral dan spontan, melainkan strategi wacana yang sarat kepentingan ideologis, sehingga kajian perlu memperhatikan bentuk eufemisme, referen yang disamarkan, konteks peristiwa, dan fungsi komunikatifnya.

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik ketika komunikasi pejabat publik berlangsung melalui dua medium dengan karakteristik yang berbeda, yaitu komunikasi lisan dalam konferensi pers dan komunikasi tertulis melalui unggahan media sosial resmi. Konferensi pers berlangsung secara langsung dan interaktif, sehingga pejabat dituntut memberikan respons secara spontan terhadap pertanyaan wartawan. Sebaliknya, media sosial menyediakan waktu dan ruang yang lebih luas untuk merancang, memilih, serta menyunting pesan sebelum dipublikasikan. Perbedaan karakteristik kedua medium tersebut berpotensi memengaruhi pemilihan diksi, tingkat keterusterangan dalam penyampaian informasi, serta penggunaan strategi eufemisme. Oleh karena itu, perbandingan keduanya penting untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang digunakan.Kajian ini juga relevan bagi pendidikan bahasa untuk menumbuhkan kepekaan peserta didik terhadap dimensi sosial dan ideologis pilihan kata. Peserta didik perlu memahami bukan hanya makna denotatif, tetapi juga bagaimana pilihan kata, termasuk eufemisme, menghasilkan efek dalam konteks sosial, budaya, dan kekuasaan, terutama pada teks nonfiksi dan digital seperti berita, pidato, dan unggahan media sosial pejabat. Rahayu dan Nurbaya (2022) menegaskan bahwa membaca kritis teks nonliterer mencakup kemampuan mengidentifikasi kesesuaian fakta, gagasan, argumentasi, dan isi teks dengan konteksnya, sehingga pembaca menimbang siapa berbicara, dalam situasi apa, dan untuk tujuan apa. Literasi kritis diarahkan agar peserta didik menganalisis ideologi atau kepentingan di balik teks dan menghubungkannya dengan realitas sosial (Hidayat et al., 2025; Mukti et al., 2025; Triana & Ikawati, 2025).

Penguatannya dilaporkan meningkatkan kemampuan membedakan fakta dan opini serta sikap reflektif terhadap teks digital (Cahyani et al., 2024; Hardianti, 2024; Rohman, 2022; Saputra, 2025), dan Septiana dan Rahmawati (2021) telah merintis teks berita sebagai bahan ajar eufemisme di SMP.

Penelitian terdahulu umumnya memosisikan eufemisme politik sebagai objek linguistik murni atau analisis wacana kritis tanpa menautkannya dengan pembelajaran bahasa (Aytan et al., 2021; Crespo-Fernández, 2018; Jaganegara & Wijana, 2023; Kurniawati et al., 2022; Refma et al., 2026), sedangkan penelitian pendidikan bahasa yang menekankan teks autentik belum mengaitkannya dengan eufemisme pejabat publik lintas medium (Mukti, et al., 2025; Rahayu & Nurbaya, 2022; Septiana & Rahmawati, 2021). Ruang yang belum digarap ialah mempertemukan kedua ranah itu dengan menjadikan diksi dan eufemisme pernyataan pejabat, baik di konferensi pers maupun media sosial resmi, sebagai objek kajian linguistik sekaligus sumber belajar kontekstual.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa pilihan kata pejabat publik tidak pernah netral: diksi dapat mempertegas atau memperhalus peristiwa, dan eufemisme dapat mengubah cara suatu persoalan dipersepsikan khalayak. Penelitian ini juga menduga bahwa perbedaan medium, yakni lisan yang spontan dan tulis yang terencana, menghasilkan pola diksi dan eufemisme yang berbeda. Sebagai bahan belajar, bentuk langsung dan eufemistis dapat dibandingkan peserta didik untuk mengenali perubahan nuansa makna dan mempertanyakan alasan pemilihan kata, sehingga analisis bahasa pejabat publik bernilai deskriptif bagi linguistik sekaligus pedagogis bagi literasi kritis (Mukti, et al., 2025).

Berdasarkan argumen tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan penggunaan diksi serta eufemisme dalam komunikasi pejabat publik pada konferensi pers dan media sosial resmi, serta merumuskan implikasinya bagi pembelajaran Bahasa Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi bentuk pilihan kata yang menonjol, (2) mengklasifikasikan bentuk eufemisme yang ditemukan, (3) menjelaskan fungsi dan konteks penggunaannya, dan (4) mengkaji potensinya sebagai bahan autentik untuk mengembangkan literasi kritis dan pemahaman makna kontekstual.

METODE PENELITIAN

Objek, Peristiwa, dan Lembaga Penelitian

Objek penelitian ini adalah tuturan verbal pejabat publik Indonesia berupa pernyataan resmi yang disampaikan dalam kapasitas kedinasan, bukan sebagai pribadi. Data berasal dari korpus 40 pernyataan yang dipublikasikan sepanjang 2026, dengan isu yang beragam: pemaparan kebijakan anggaran dan program

prioritas (misalnya anggaran pendidikan dan kondisi fiskal negara), penanganan kedaruratan bencana, hingga ucapan yang memicu polemik karena dinilai kurang empatik, merendahkan, atau tidak sesuai kondisi lapangan. Lembaga yang tercakup mewakili berbagai level dan cabang pemerintahan, yakni eksekutif pusat (Kepresidenan, kementerian, dan kementerian koordinator), legislatif (DPR RI), penegak hukum (KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan TNI), serta pemerintah daerah dari provinsi hingga kecamatan, agar pola diksi dan eufemisme yang ditemukan mencerminkan kecenderungan yang lebih luas, bukan gaya satu institusi.

Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis wacana berbasis korpus (*corpus-based discourse analysis*), karena datanya berupa tuturan otentik yang ditranskripsikan, bukan hasil wawancara atau observasi partisipan. Analisis dilakukan dalam dua lapis: identifikasi gaya komunikasi sebagai kategorisasi awal, lalu analisis diksi dan eufemisme sebagai fokus linguistik utama pada tiap kategori. Data berupa satuan lingual (kata, frasa, atau kalimat) yang mengandung pilihan diksi tertentu dan/atau eufemisme. Data primer berupa kutipan verbatim yang ditelusuri ke rekaman, transkrip resmi, atau video sumber utama, sedangkan data sekunder berupa parafrase dari media kredibel dan terverifikasi ketika kutipan verbatim tidak tersedia. Sebagian besar dari 40 data telah memiliki kutipan asli, sedangkan sisanya masih berupa parafrase media yang akan dilengkapi ke sumber primer pada tahap verifikasi.

Sumber Informasi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif non-interaktif (*non-interactive qualitative research*) karena sumbernya dokumen tuturan resmi, sehingga tidak terdapat informan atau responden dalam arti lazim. Sumber informasinya adalah korpus 40 pernyataan sebagai "informan tekstual" yang dipilih berdasarkan empat kriteria: (1) dipublikasikan pada 2026; (2) disampaikan pejabat yang sedang menjabat; (3) isunya diliput luas media; dan (4) berasal dari konferensi pers/pidato resmi atau media sosial resmi/pernyataan yang banyak dikutip media. Peneliti menjadi instrumen utama (*human instrument*) yang menelusuri, memverifikasi, dan menafsirkan data, dibantu lembar korpus berisi tanggal, nama dan jabatan, instansi, saluran, isu, ringkasan, kutipan asli, kategori gaya, status verifikasi, dan tautan sumber. Lembar ini sekaligus menjadi jejak audit (*audit trail*).

Proses Penelitian: Tahapan dan Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dalam empat tahap. Pertama, menginventarisasi pernyataan pejabat dari media kredibel serta kanal

resmi instansi dan media sosial. Kedua, memverifikasi silang ringkasan media dengan sumber primer (video atau transkrip resmi), membandingkan minimal dua tautan per data bila tersedia. Ketiga, mencatat kutipan asli beserta konteksnya (waktu, saluran, isu, respons publik). Keempat, memberi kode awal gaya komunikasi berdasarkan indikator leksikal, modalitas, dan struktur kalimat, dengan lima kategori: Asertif (leksikon seperti "pastikan" dan "tegaskan", modalitas kepastian tinggi), Defensif (pembelaan diri seperti "bukan bermaksud" dan "klarifikasi"), Retoris-populis (sapaan akrab, repetisi, hiperbola), Akomodatif (kesediaan merespons langsung dan runtut), dan Evasif (modalitas ketidakpastian, kalimat mengambang, atau pengalihan topik).

Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Analisis mengikuti model interaktif (Miles et al., 2020) dalam enam langkah: (1) reduksi data, menyaring 40 data menjadi yang layak dianalisis berdasarkan kelengkapan kutipan dan konteks; (2) koding satuan diksi/eufemisme dengan lima kategori gaya sebagai kerangka awal, lalu mengidentifikasi indikator diksi dan bentuk eufemisme menonjol pada tiap kategori; (3) kategorisasi eufemisme menurut fungsi, seperti pelunakan makna negatif, pengalihan fokus, penundaan jawaban, atau pembingkaian citra positif; (4) penyajian data berupa tabel distribusi gaya komunikasi per saluran; (5) interpretasi referen, konteks, dan fungsi komunikatif; dan (6) penarikan serta verifikasi simpulan sebagai implikasi bagi pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan minimal dua tautan per data bila tersedia), ketekunan membaca ulang kutipan asli agar konteks tidak salah ditafsirkan, keterlacakan melalui pencantuman tautan sumber pada setiap data, dan audit kategori, yakni peninjauan ulang kategori gaya "dugaan awal" dengan panduan indikator sebelum ditetapkan final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Korpus penelitian terdiri atas 40 data pernyataan pejabat publik dari dua saluran komunikasi, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Distribusi Data Berdasarkan Saluran Komunikasi

Saluran	Jumlah	Persentase
Konferensi pers/pidato resmi	26	65%
Media sosial resmi/dikutip luas media	14	35%
Jumlah	40	100%

Tabel 2 memperlihatkan bahwa 26 dari 40 pernyataan (65%) berasal dari konferensi pers atau pidato resmi, sedangkan 14 data (35%) berasal dari media sosial resmi atau pernyataan yang dikutip luas media.

Setelah pengodean sesuai bagian metode, distribusi kategori gaya komunikasi seluruh korpus disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Distribusi Kategori Gaya Komunikasi pada Korpus Penelitian

Kategori	Jumlah	Persentase
Asertif	12	30%
Akomodatif	8	20%
Retoris-populis	8	20%
Evasif	7	17,5%
Defensif	5	12,5%
Jumlah	40	100%

Asertif menempati proporsi tertinggi (30%), disusul Akomodatif dan Retoris-populis dengan proporsi setara (masing-masing 20%), lalu Evasif (17,5%), sedangkan Defensif memiliki proporsi terendah (12,5%).

Penjelasan Data

Berikut karakteristik diksi dan indikasi eufemisme tiap kategori beserta contoh data terverifikasi.

a) Asertif ditandai diksi kepastian dan data kuantitatif eksplisit, dengan eufemisme yang minim karena tuturan bertujuan menegaskan, bukan melunakkan makna. Pernyataan Panglima TNI Agus Subiyanto menegaskan lingkup tanggung jawabnya secara langsung tanpa pelunakan, tetapi justru memicu kritik karena dianggap mengaburkan batas kewenangan lembaga (data no. 37). Diksi hiperbolik "sampai titik darah penghabisan" dari Kapolri (data no. 38) menunjukkan asertivitas yang oleh pengamat dinilai berlebihan.
b) Defensif memuat eufemisme paling menonjol di antara seluruh kategori, berupa diksi yang memperkecil makna kesalahan atau menyamarkan sikap merendahkan. Penyebutan pengkritik kebijakan sebagai "sebagian kecil rakyat" (data no. 11) mengecilkan skala kritik tanpa menyangkalnya secara langsung. Istilah historis yang dieufemismekan secara implisit untuk merujuk pihak pengkritik (data no. 13) membawa muatan konotatif yang tidak netral, meskipun disampaikan dalam bingkai argumentasi demokrasi.

c) Evasif ditandai diksi yang mengaburkan kepastian dan menunda jawaban langsung. Jawaban Deputi Penindakan KPK yang merujuk pada pasal alih-alih menjawab tegas pertanyaan pers (data no. 27) mengalihkan topik melalui diksi prosedural-formal. Klaim tentang upah pengupas bawang (data no. 14) memakai diksi ilustratif-anekdotal yang mengalihkan perhatian dari data kolektif yang semestinya lebih representatif.
d) Akomodatif ditandai diksi kooperatif dan responsif, dengan eufemisme yang bertujuan menenangkan tanpa menyangkal isu yang dipersoalkan. Pernyataan "Belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS" (data no. 20) memakai "belum ada rencana" sebagai pelunakan yang membuka ambiguitas temporal, alih-alih kepastian "tidak akan naik".
e) Retoris-populis ditandai diksi emosional, sapaan akrab, dan gaya informal yang membangun kedekatan, tetapi berpotensi memunculkan diksi yang dinilai tidak pantas dalam forum resmi. Tuturan "Kami kunjungan kerja sekaligus mengunjungi Gubernur Maluku, tante cantik ini yang siap menerima kunjungan dari para laki-laki yang ada di Republik ini" kepada gubernur perempuan dalam forum kedinasan (data no. 31) memperlihatkan sapaan akrab yang bergeser menjadi diksi yang dinilai merendahkan ketika lepas dari kesadaran akan konteks formal.

Hubungan Antar Data

Tabulasi silang antara saluran komunikasi dan kategori gaya komunikasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Tabulasi Silang Saluran Komunikasi dan Kategori Gaya Komunikasi

Kategori	Konferensi Pers (n=26)	Media Sosial (n=14)
Asertif	9 (34,6%)	3 (21,4%)
Akomodatif	5 (19,2%)	3 (21,4%)
Retoris-populis	6 (23,1%)	2 (14,3%)
Evasif	4 (15,4%)	3 (21,4%)
Defensif	2 (7,7%)	3 (21,4%)

Tabel 4 menunjukkan bahwa gaya Asertif mendominasi konferensi pers (34,6%), sedangkan gaya Defensif muncul tiga kali lebih proporsional di media sosial (21,4%) dibanding di konferensi pers (7,7%).

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diksi pejabat publik tidak bersifat acak, melainkan berkorelasi dengan dua faktor: saluran komunikasi dan tingkat tekanan sosial yang dihadapi pejabat. Sebagaimana tampak pada Tabel 3

dan Tabel 4, eufemisme paling produktif ditemukan pada kategori Defensif dan Evasif, yakni pada tuturan yang memperkecil makna kesalahan, menunda kepastian jawaban, atau mengaburkan pihak sasaran kritik.

Temuan ini sejalan dengan konsep *self-protection* (perlindungan diri) Crespo-Fernández (2018), bahwa eufemisme dalam wacana politik melindungi citra penutur ketika ia harus menyampaikan informasi yang berpotensi merugikan posisinya di hadapan publik. Temuan ini juga memperkuat simpulan penelitian Refma dkk. (2026) bahwa eufemisme dalam wacana politik Indonesia berkaitan erat dengan status sosial aktor dan fungsi pembingkaian (*framing*) pesan. Namun, kedua kajian itu umumnya menganalisis pernyataan pejabat pada satu medium. Penelitian ini memperluasnya dengan menunjukkan bahwa saluran komunikasi, yaitu konferensi pers dibandingkan media sosial, turut memengaruhi intensitas dan jenis eufemisme, sebuah dimensi perbandingan lintas medium yang belum banyak disoroti. Inilah pembeda utama penelitian ini dari kajian terdahulu.

Proporsi gaya Defensif di media sosial yang tiga kali lebih tinggi (21,4%) dibanding di konferensi pers (7,7%) dapat dijelaskan melalui konsep *face-saving act* dalam kajian kesantunan Brown dan Levinson. Ruang digital lebih terbuka terhadap respons publik yang instan dan berpotensi viral, sehingga pejabat memakai eufemisme reaktif untuk menjaga muka negatif (*negative face*) saat menghadapi kritik langsung dan masif. Sebaliknya, konferensi pers yang lebih terstruktur, searah, dan umumnya disiapkan dengan data pendukung mendorong diksi yang lebih asertif dan minim eufemisme. Dengan demikian, karakter medium turut membentuk strategi menjaga citra yang dipilih pejabat.

Bagi pembelajaran Bahasa Indonesia, pernyataan pejabat publik berpotensi menjadi bahan ajar autentik untuk melatih peserta didik membedakan makna denotatif dan konotatif, mengenali fungsi eufemisme, dan mengembangkan literasi kritis dengan membandingkan diksi asli dan makna yang "disamarkan", lalu mempertanyakan alasan pemilihannya. Pada jenjang dasar dan menengah, korpus ini relevan dengan kompetensi membaca kritis teks nonfiksi (Rahayu & Nurbaya, 2022), yang melatih peserta didik mempertanyakan "mengapa kata ini yang dipilih, bukan kata lain". Misalnya, diksi "belum ada rencana menaikkan tarif" dibandingkan dengan "tidak akan naik", lalu efek maknanya didiskusikan. Aktivitas ini sekaligus membuka ruang literasi digital karena sebagian data berasal dari media sosial, ruang baca sehari-hari peserta didik.

Pada jenjang menengah atas dan awal perguruan tinggi, teks yang sama dapat diperdalam menjadi materi analisis wacana tentang pilihan bahasa dan pembentukan opini publik, sejalan dengan literasi kritis yang memandang teks sebagai ruang memahami hubungan bahasa, makna, dan realitas sosial (Triana

& Ikawati, 2025; Hidayat dkk., 2025). Peserta didik tidak hanya mengenal bentuk eufemisme, tetapi juga memahami fungsi ideologisnya, yaitu siapa yang diuntungkan dan siapa yang berpotensi dirugikan oleh pilihan diksi.

Implikasi paling spesifik muncul pada mata kuliah Pragmatik. Kelima kategori gaya komunikasi dalam korpus merupakan realisasi konkret konsep inti pragmatik yang sering diajarkan secara abstrak melalui contoh buatan, dan dapat dipetakan langsung ke materi kuliah pada Tabel 5.

Tabel 5.
Pemetaan Konsep Pragmatik dengan Data Korpus

Konsep Pragmatik	Materi Kuliah	Contoh dari Korpus
Implikatur percakapan	Makna tersirat di balik ujaran	Jawaban Deputi KPK yang merujuk pasal alih-alih menjawab langsung (data no. 27); mahasiswa diminta menyimpulkan implikatur di balik jawaban prosedural tersebut. Tuturan: "Mohon dilihat ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19".
Face-saving act & kesantunan	Strategi menjaga muka positif/negatif (Brown & Levinson, 1987)	Diksi "sebagian kecil rakyat" (data no. 11) sebagai strategi negative face yang mengecilkan skala kritik tanpa menyangkalnya. Tuturan: "Tapi pada dasarnya begini. Itu, kan, suara sebagian kecil rakyat kita..."
Tindak tutur tidak langsung	Perbedaan makna literal dan maksud penutur	Diksi "belum ada rencana" (data no. 20) sebagai tindak tutur yang secara literal netral, namun berfungsi menunda kepastian. Tuturan: "Belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS".
Praanggapan dan konteks	Ketergantungan makna pada situasi tutur	Perbandingan diksi yang sama pada saluran berbeda (konferensi pers vs. media sosial) untuk menunjukkan bagaimana konteks mengubah efek pragmatis tuturan.

Melalui pemetaan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari definisi teoretis, tetapi juga berlatih mengodekan data otentik dengan indikator yang sama dengan penelitian ini, yaitu indikator leksikal, modalitas, dan struktur kalimat, sehingga pembelajaran berprogres dari pemahaman konsep menuju

keterampilan analisis wacana terapan. Korpus ini berpotensi dikembangkan menjadi modul praktikum pragmatik berbasis data komunikasi publik nyata.

Kontribusi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, secara linguistik, karakter medium terbukti turut menentukan intensitas dan jenis eufemisme pejabat publik, memperluas kajian terdahulu yang umumnya berhenti pada satu medium. Kedua, secara pedagogis, fenomena kebahasaan ini ditautkan secara eksplisit dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, dari literasi kritis di jenjang dasar dan menengah hingga analisis wacana dan pragmatik di perguruan tinggi, keterkaitan yang belum banyak dieksplorasi pada penelitian eufemisme sebelumnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diksi pejabat publik bukan gejala kebahasaan yang acak. Eufemisme paling produktif muncul pada gaya defensif dan evasif untuk memperkecil kesalahan, menunda kepastian, atau mengaburkan sasaran kritik, sementara gaya asertif justru minim eufemisme. Temuan kunci adalah bahwa saluran komunikasi turut menentukan pola tersebut: gaya defensif tiga kali lebih menonjol di media sosial dibanding konferensi pers, memperluas konsep *self-protection* dan *face-saving act* ke dimensi lintas medium yang belum banyak dikaji sebelumnya. Kontribusi penelitian ini bersifat ganda, yaitu memperkaya kajian eufemisme politik secara linguistik sekaligus menautkannya secara eksplisit dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, dari literasi kritis hingga pemetaan konsep pragmatik di perguruan tinggi. Namun, penelitian ini terbatas pada korpus 40 data tahun 2026 yang sebagian masih berupa parafrase media, sehingga penelitian lanjutan perlu memperluas cakupan waktu, memperkuat verifikasi kutipan primer, dan menguji efektivitas korpus ini sebagai bahan ajar di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Khasawneh, F. (2018). An intercultural study of euphemistic strategies used in Saudi Arabic and American English. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, *8*(1), 217–225. https://doi.org/10.17509/ijal.v8i1.11466

Al-Momani, H. A. (2017). Political Discourse of Jordan: A Critical Discourse Analysis. *International Journal of English Linguistics*, *7*(2), 90. https://doi.org/10.5539/ijel.v7n2p90

Anggara, R., Al Hamdi, R., & Suswanta. (2024). Utilizing Social Media As a Strategic Communication Tool By The Minister In Indonesia. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, *25*(2), 241–256. https://doi.org/10.17933/iptekkom.25.2.2023.241-256

Aytan, A., Aynur, B., Hila, P., Aytac, E., & Malahat, A. (2021). Euphemisms and dysphemisms as language means implementing rhetorical strategies in political discourse. *Journal of Language and Linguistic Studies*, *17*(2), 741–754. https://doi.org/10.52462/jlls.52

Azaky, A., Mulya, O. H., & Hermandra, H. (2024). Eufemisme Dalam Pidato Soekarno Pada Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. *Jurnal Basataka (JBT)*, *7*(2), 688–698. https://doi.org/10.36277/basataka.v7i2.516

Cahyani, N., Hutagalung, E. N. H., & Harahap, S. H. (2024). Berpikir Kritis Melalui Membaca: Pentingnya Literasi Dalam Era Digital. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, *2*(1), 417–422. https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1795

Crespo-Fernández, E. (2018). Euphemism as a discursive strategy in US local and state politics. *Journal of Language and Politics (JLP)*, *17*(6), 789–811. https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/jlp.17040.cre

Filimonova, N.V.; Sukhanova, A. A. (2025). The phenomenon of euphemia in US political discourse. *Russian Linguistic Bulletin*, *6*(66), 6–9. https://doi.org/10.60797/RULB.2025.66.19%5C

Hardianti, M. (2024). Indonesian higher education students' perception on critical literacy. *Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities*, *11*(2), 111. https://doi.org/10.22373/ej.v11i2.20003

Harista, R., Masnunah, M., & Nufus, H. (2025). Eufemisme dan Disfemisme pada Judul Berita E-Sumatera Ekspres. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, *5*(3), 01–12. https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v5i3.6084

Haryadi, A. T. (2024). Peran Media Sosial dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik. *Indonesian Research Journal on Education Web:*, *4*(4), 3342 – 3349. https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.1216

Hasti, I., & Qodir, Z. (2024). Mapping of Government's Communication Strategies in the COVID-19 Era on Social Media. *Journal of Governance and Public Policy*, *11*(2), 180–192. https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i2.16710

Hidayat, R. A. U., Setyarini, S., Gustine, G. G., & Hermawan, B. (2025). A qualitative case study of critical literacy in boosting EFL students' critical language awareness: Critical literacy in teaching exposition text and its impacts. *Journal on English as a Foreign Language*, *15*(1), 342–366. https://doi.org/10.23971/jefl.v15i1.9680

Jabborova, A. (2025). Euphemisms As A Face-Saving Strategy In A Political Leader's Speech: A Case Study Of Barack Obama's 2016 State Of The Union Address. *International Journal Of Literature And Languages*, *5*(11), 203–206. https://doi.org/10.37547/ijll/volume05issue11-48

Jaganegara, H., & Wijana, I. D. P. (2023). Euphemism roles as a disguise tool in

political texts: A case study of Tempo online political articles. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, *5*(1), 1–19. https://doi.org/10.15642/suluk.2023.5.1.1-19

Khajavi, Y., & Rasti, A. (2020). A discourse analytic investigation into politicians' use of rhetorical and persuasive strategies: The case of US election speeches. *Cogent Arts and Humanities*, *7*(1). https://doi.org/10.1080/23311983.2020.1740051

Kurniawati, W., Ekoyanantiasih, R., Yulianti, S., Hardaniawati, M., Sasangka, S. S. T. W., & Firdaus, W. (2022). KEKUASAAN SEMANTIK DALAM ANALISIS WACANA KRITIS DEBAT CAPRES-CAWAPRES. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, *11*(1), 165–179. https://doi.org/10.26499/rnh.v11i1.4966

Liu, Dilin; Lei, L. (2018). The appeal to political sentiment: An analysis of Donald Trump's and Hillary Clinton's speech themes and discourse strategies in the 2016 US presidential election. *Discourse, Context & Media*, *25*, 143–152. https://doi.org/10.1016/j.dcm.2018.05.001

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)* (4th ed.). SAGE Publications.

Muhammad Fahmi, Nurhadi; Utami, S. P. T. (2026). REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM WACANA POLITIK: ANALISIS WACANA KRITIS WAWANCARA PRESIDEN PRABOWO DI KOMPAS.COM. *BAHTERA INDONESIA: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *11*(1), 211–229. https://doi.org/10.31943/bi.v11i1.1370

Mukti, Ahmad Permana Yudha; Wicaksana, Muhlis Fajar; Pardyatmoko, P. (2025). MODEL PEMBELAJARAN LITERASI KRITIS DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA: STUDI KASUS DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN. *Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *7*(2), 483–490. https://doi.org/10.26499/bahasa.v7i2.1531

Rahayu, D. H., & Nurbaya, S. (2022). Competency construct model for critical reading in non-literary texts based on the framework of the Indonesian National Qualification (KKNI). *Diksi*, *30*(2), 188–198. https://doi.org/10.21831/diksi.v30i2.58480

Refma, A. M., Setiawan, T., & Efendi, A. (2026). Euphemism in Indonesian Online Political Media Discourse : Referents , Social Status , and Communicative Functions. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 143–165. https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/7358

Rohman, A. (2022). Literasi dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis di Era Disrupsi. *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, *2*(1), 40. https://doi.org/10.30821/eunoia.v2i1.1318

Rosyidah, I., Bisri Mustofa, Muhamad Rofik Fitrotulloh, & Efy S.Atanjuani. (2025). Euphemism And Social Prejudice In The 2024 Presidential Debate: Anies's Rhetoric Toward Prabowo. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, *10*(1), 361–384. https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4349

Rozak Riaji, I. A., Zaelani, A., & Fahrizal Taharas, R. (2026). Eufemisme Dalam Bahasa Politik Indonesia: Kajian Konseptual. *Jurnal Dialektika Politik*, *10*(1), 23–33. https://doi.org/10.37949/jdp.v10i1.257

Saputra, E. E. D. (2025). Hubungan Antara Kemampuan Membaca Kritis dan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V Sekolah Dasar. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, *5*(1), 476–483. https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.1216

Saud, Muhammad; Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, *18*(4), 443–454. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019

Septiana, R. E., & Rahmawati, L. E. (2021). Implementasi Eufemisme Dalam Berita Utama Surat Kabar Tempo Sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia Di Smp. *Prasi*, *16*(01), 40. https://doi.org/10.23887/prasi.v16i01.34100

Siahaan, R. P., Bacas, C. A., Daulay, O. A., Sembiring, T. A., & Rangkuti, R. (2024). a Euphemism Analysis in the 2024 Indonesian Presidential Election Debate. *KLAUSA (Kajian Linguistik, Pembelajaran Bahasa, Dan Sastra)*, *8*(2), 121–131. https://doi.org/10.33479/klausa.v8i2.1113

Sun, J., & Liu, Z. (2023). Evaluation Mechanism of Political Discourse: A Holistic Approach. In *Journal of Psycholinguistic Research* (Vol. 52, Number 6). Springer US. https://doi.org/10.1007/s10936-023-09988-7

Triana, N. M., & Ikawati, E. (2025). Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Perspektif Literasi kritis dan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, *4*, 2510–2516. https://jpion.org/jpion.org/index.php/jpi/article/view/807

Tuhana, V. E., Daga, L. L., Aslam, M., Lada, H. L. ., & Edo, J. (2023). Strategi Digital Public Relations Pemerintah Kota Kupang Melalui Media Sosial. *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, *12*(2), 297–315. https://doi.org/10.35508/jikom.v12i2.9173

Wang, Sze-Yuh Nina; Inbar, Y. (2021). Moral-Language Use by U.S. Political Elites. *Psychological Science*, *32*(1), 14–26. https://doi.org/10.1177/0956797620960397

Widiasih, S., Julina, F., & Salsabila, I. S. (2024). Analisis Sosial Media Pemerintah Daerah Di Indonesia Berdasarkan Respons Warganet. *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, *9*, 11–17. https://doi.org/10.71040/irpia.v9i11.266